

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana tabrak lari di wilayah hukum Polresta Jambi mengalami peningkatan selama periode 2022 hingga 2024. Meskipun demikian, penegakan hukum terhadap peristiwa tersebut dilakukan secara optimal dan berimbang dengan jumlah kasus yang terjadi. Proses penegakan hukum dilaksanakan sesuai prosedur yang meliputi penerimaan laporan dari masyarakat, pendatanganan ke lokasi kejadian, olah tempat kejadian perkara (TKP), pengumpulan alat bukti, pencarian saksi, hingga penyelidikan dan gelar perkara untuk melanjutkan ke tahap penyidikan. Dalam penanganan kasus, aparat kepolisian menerapkan ketentuan Pasal 310 dan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan bentuk sanksi yang dapat berupa pidana penjara, denda, atau penyelesaian melalui mekanisme *restorative justice* apabila memenuhi syarat.
2. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat sejumlah kendala yang cukup signifikan. Kendala tersebut antara lain tidak adanya saksi yang melihat langsung kejadian, tidak dikenalnya identitas korban maupun pelaku, serta minimnya dukungan alat bukti seperti rekaman CCTV di lokasi kejadian. Hambatan-hambatan ini memperlambat proses identifikasi dan penyelidikan terhadap pelaku, sehingga menuntut aparat penegak hukum untuk bekerja lebih keras dengan memaksimalkan sumber daya yang ada.

Oleh karena itu, dukungan dari masyarakat dan peningkatan sarana pendukung seperti pemasangan CCTV di titik rawan kecelakaan menjadi penting dalam mendukung keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari di wilayah hukum Polresta Jambi, disarankan agar pihak kepolisian terus memperkuat sistem pelaporan masyarakat dan meningkatkan kapasitas petugas dalam pelaksanaan olah TKP serta penyelidikan. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan rutin dan peningkatan sarana pendukung penyidikan, serta sosialisasi hukum kepada masyarakat agar lebih memahami konsekuensi hukum dari tindak tabrak lari dan pentingnya bertanggung jawab dalam berlalu lintas.
2. Untuk mengatasi kendala dalam pengungkapan kasus tabrak lari, disarankan agar Pemerintah Kota Jambi bekerja sama dengan aparat kepolisian meningkatkan pemasangan kamera CCTV di titik-titik rawan kecelakaan. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk menjadi saksi aktif juga perlu ditumbuhkan melalui edukasi publik. Peningkatan teknologi pendukung dalam identifikasi kendaraan dan pelaku juga sangat direkomendasikan guna mempercepat proses penyelidikan dan memperkecil kemungkinan pelaku melarikan diri tanpa pertanggungjawaban hukum.